

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada program Studi ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan**



Oleh

ERMAWATI

NPM.18.81.0161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI**

2022

ABSTRAK

Ermawati NPM.18.81.0161. 2022. *Analisis Yuridis Kekuatan Eksekusi Jaminan Fidusia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Dosen Pembimbing I Dr. Afif Khalid S,Hi,.,S.H ,.MH. Dosen Pembimbing II Muthia Septarina, S.H ,.M.H.

Kata kunci; Eksekusi jaminan fidusia, Wanprestasi jaminan fidusia.

Objek fidusia sudah diatur Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, namun ketentuan itu belum mampu memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk dapat menganalisis perlindungan hukum bagi penerima fidusia yang jaminannya berupa piutang berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi penerima fidusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan Normatif dan data pustaka sesuai dengan peraturan Undang-undang serta peraturan pemerintah tentang cara pendaftaran jaminan fidusia yang berhubungan dengan penelitian ini dan ketentuan mengenai eksekusi piutang terhadap debitur yang wanprestasi berbagai penafsiran hukum yang menyebabkan kreditur selaku penerima fidusia membutuhkan perlindungan hukum yang berpotensi mengalami kerugian dikemudian hari akibat dari debitur yang tidak menjalankan kewajibannya melunasi piutang yang telah disepakati bersama serta adanya eksekusi jaminan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi untuk melakukan penyitaan dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses dan prosedur eksekusi barang jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditor pada prinsipnya proses eksekusi tetap dilakukan oleh pihak pemegang jaminan yang dalam hal ini kreditor yang sebenarnya disahkan menurut hukum dan prosedur eksekusi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan merupakan jalan alternatif, Apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam cendera janji untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan berdasarkan Undang-undang jaminan fidusia. Eksekusi dalam arti luas tidak hanya mencakup pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun termasuk segala bentuk pelaksanaan dalam hal wanprestasi maka pihak kreditor agar tidak langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.Y.Witanto, SH.2015.*Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen*. Penerbit mandar maju/2015/Bandung.
- Drs. Nico Ngani, S.H, MSSW, MM, CLE, Dipl. Phil. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Penerbit Pustaka Yustisia/2012/Yogyakarta.
- H.Tan kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia, Praktik Bank dan Pengadilan Bandung*
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Op.,cit.,hlm 119-122.
- M.Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta.
- Prof.Dr.H. Salim HS.,S.H.,M.S.*Teknik Pembuatan Akta Perjanjian(TPA DUA)*
Penerbit PT.RajaGrafindo Persada/2017/Jakarta.
- Retnowulan Sutanti, *Penagihan piutang Negara Melalui PUPN dan pengadilan Negeri*.
- Soesilo.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BurgerlijiWetbook*. Cetakan/2020
Penerbit Buana Press.

Website

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) 2011*.
- www.hukumonline.com.oleh Mochamad Januar Rizki 2021.
- Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Ardika karya sontuso,
Univesitas Jember Fakultas hukum Tahun 2016.

Peraturan PerUndang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Undang-Undang Perbankan*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.
- Mahkamah Agung Konstitusi Nomor.18/PUU-XVII/2019.
- Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.